



DAMPAK PENIPUAN LOWONGAN KERJA DAN PENCEGAHANNYA

Efendi* dan Luthvi Febryka Nola**

Abstrak

Penipuan lowongan kerja semakin marak di Indonesia, bahkan menjadikan Indonesia sebagai salah satu hotspot penipuan lowongan kerja di Asia Pasifik. Pada tahun 2024, lebih dari seribu warga negara Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang bermula dari penawaran kerja palsu. Tulisan ini mengkaji berbagai dampak dari penipuan lowongan kerja dengan harapan dapat merumuskan upaya pencegahannya secara lebih komprehensif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa maraknya penipuan lowongan kerja menimbulkan kerugian materiel maupun imateriel bagi pencari kerja, mencoreng reputasi platform lowongan kerja dan perusahaan, serta mengganggu keamanan nasional. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui penguatan regulasi, perbaikan infrastruktur, peningkatan literasi digital dan hukum, serta pembangunan koordinasi yang solid. Dalam hal ini, Komisi IX DPR RI dapat berperan melalui fungsi anggaran untuk mendukung perbaikan infrastruktur, melalui fungsi legislasi untuk memperkuat aturan pelaporan lowongan kerja dalam RUU Ketenagakerjaan, serta melalui fungsi pengawasan untuk mendorong pemerintah meningkatkan literasi dan memperkuat koordinasi antarinstansi.

Pendahuluan

Dalam dua tahun terakhir, penurunan jumlah pengangguran sangat kecil malah dari Februari 2024 hingga Februari 2025 terjadi peningkatan dari 7,19 juta menjadi 7.28 juta (BPS, 2025). Angka pengangguran sangat sulit ditekan karena terbatasnya lapangan kerja sebagai akibat perlambatan ekonomi, pertambahan penduduk usia kerja, dan digitalisasi (Larasati, 2025). Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya kebutuhan hidup.

Situasi ini membuat para pencari kerja mudah terjebak tawaran kerja yang tampak menjanjikan akan tetapi sesungguhnya sebuah praktik penipuan. Cybersecurity Research Center Indonesia mencatat 4 dari 10 pencari kerja di platform daring pernah menerima tawaran kerja mencurigakan dalam 12 bulan terakhir, dan sekitar 12 persen di antaranya menjadi korban penipuan (Cityguard, 2025). SEEK, perusahaan induk Jobstreet dan JobsDB, menempatkan Indonesia sebagai salah satu hotspot penipuan lowongan kerja yang menyumbang 38 persen dari seluruh percobaan penipuan di Asia Pasifik dan 62 persen dari total kasus di Asia ("Indonesia Jadi Pusat Penipuan Kerja", 2025).

*) Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: efendi@dpr.go.id

**) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: luthvi.nola@dpr.go.id

Penipuan lowongan kerja merupakan tindak kejahatan serius yang dapat membuat pencari kerja mengalami berbagai kerugian bahkan sampai menjadi korban perdagangan orang. Pada tahun 2024, seribu lebih warga negara Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang ada kaitannya dengan penawaran kerja palsu (Nadira, 2025). Oleh karenanya menarik untuk dibahas terkait bagaimana dampak penipuan lowongan kerja sehingga dapat diketahui upaya pencegahannya.

Dampak Penipuan Lowongan Kerja

Penipuan lowongan kerja semakin marak dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat. Modus yang terus berkembang, mulai dari penawaran pekerjaan tidak resmi hingga penyalahgunaan identitas perusahaan, membuat banyak pencari kerja terjebak dan mengalami kerugian. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga menimbulkan konsekuensi luas bagi platform pencari kerja, perusahaan, hingga keamanan nasional.

Adapun dampak bagi korban (pencari kerja) adalah kerugian materiel karena modus umum yang digunakan adalah dengan meminta uang dimuka atau biasa disebut uang jaminan. Laporan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mencatat bahwa dari 823 orang menjadi korban penipuan selama 2022–2024 total kerugian yang dialami pencari kerja mencapai Rp59 miliar (Nadira, 2025). Selain itu, kerugian materiel juga bisa diakibatkan penyalahgunaan data pribadi pencari kerja, seperti nomor rekening, kartu tanda penduduk (KTP) dan data sensitif lainnya. Seperti yang terjadi pada puluhan warga di Jakarta Timur, KTP mereka digunakan oleh pelaku penipuan untuk mengajukan pinjaman *online* sehingga mereka terjatuh utang dan menghadapi tekanan psikologis dari penagih utang (Nurhadi, 2024). Tekanan psikologis merupakan bagian kerugian imateriel yang dialami korban, akibatnya beragam mulai dari hilangnya kepercayaan diri, serta berkurangnya partisipasi dalam aktivitas sosial (Cityguard.co.id, 2025).

Maraknya kasus penipuan lowongan kerja turut berdampak pada platform pencari kerja, seperti Jobstreet, Indeed dan Glints. Hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap platform pencari kerja. Penurunan kredibilitas ini membuat pencari kerja ragu menggunakan platform tersebut, sehingga memperlambat proses rekrutmen. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat berdampak pada terganggunya ekosistem ketenagakerjaan nasional karena keengganan masyarakat untuk mempercayai kanal pencarian kerja daring. Akibatnya, Platform pencarian kerja harus terus meningkatkan prosedur keamanan untuk mencegah pelaku penipuan memanfaatkan platform mereka (Aristyo, 2024). Hasilnya, pada periode Juli 2024 hingga Juni 2025, Jobstreet telah menolak 3.600 rekrut perusahaan yang gagal verifikasi, 650 akun ditutup karena berisiko penipuan dan 2.800 lowongan dihapus setelah investigasi (Nadira, 2025).

Penipuan lowongan pekerjaan juga berdampak pada perusahaan yang identitasnya disalahgunakan. Ketika nama atau identitas perusahaan digunakan oleh pelaku penipuan, reputasi dan citra perusahaan dapat terdampak secara langsung. Calon pekerja menjadi

lebih berhati-hati, bahkan menghindari proses rekrutmen dari perusahaan tersebut. Penurunan kepercayaan ini tidak hanya merugikan perusahaan dari sisi reputasi, tetapi juga dapat menghambat kemampuan mereka menjangkau kandidat potensial seperti Basco City Mall yang harus melakukan klarifikasi dan berhadapan dengan aparat penegak hukum (APH) terkait kasus penipuan terhadap 138 lebih pencari kerja yang mengatasnamakan perusahaan ini (Iriawan, 2025).

Lebih besar lagi, penipuan lowongan kerja berdampak pada keamanan nasional. Penipuan lowongan kerja kini berkembang menjadi pintu masuk kejahatan terorganisasi, termasuk TPPO yang menyasar ribuan warga negara Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa penipuan lowongan kerja tidak lagi sekadar isu individu, tetapi telah menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional dan kawasan.

Upaya Pencegahannya

Luasnya dampak dari penipuan lowongan kerja membuat masalah ini perlu segera diatasi. Upaya *pertama* yang dapat dilakukan adalah memperkuat aturan wajib lapor lowongan pekerjaan. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) tidak mewajibkan perusahaan untuk melaporkan lowongan pekerjaan. Kewajiban baru diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan. Sanksi jika pemberi kerja tidak melaporkan lowongan pekerjaan berdasarkan Perpres ini hanya sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Pelaporan seharusnya diwajibkan dalam UU Ketenagakerjaan dan sanksi yang diberikan juga tegas dalam bentuk pencabutan izin.

Upaya *kedua*, melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya APH di seluruh daerah. Peningkatan sarana digital forensik, pengembangan teknologi pelacakan siber, serta pelatihan khusus bagi APH menjadi langkah krusial untuk meningkatkan kemampuan identifikasi dan penyidikan. Upaya *ketiga*, meningkatkan edukasi/literasi hukum digital bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti lulusan baru, pekerja informal, dan pengguna internet usia muda. Program edukasi ini dapat mencakup sosialisasi hak-hak digital, panduan mengenali modus penipuan lowongan kerja, serta mekanisme pelaporan tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi atau permintaan biaya palsu. Selain itu, kampanye preventif berbasis hukum dan literasi digital melalui media sosial, platform pendidikan daring, dan kerja sama dengan institusi pendidikan atau komunitas lokal diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat mitigasi terhadap kejahatan digital.

Upaya *keempat* adalah dengan meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Kepolisian. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses penegakan hukum dan perlindungan terhadap penipuan lowongan kerja (Sihotang dkk, 2025). Sehubungan dengan hal ini Kemnaker telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hoaks

Lowongan Kerja dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komdigi, Kepolisian, dan Dinas Tenaga Kerja daerah. Kemnaker juga mendirikan Posko Pencegahan Hoaks Lowongan Kerja, yang bisa diakses melalui berbagai saluran seperti *call center*, *WhatsApp*, situs *web*, serta media sosial resmi Kemnaker.

Hal yang perlu menjadi perhatian Komisi IX DPR RI terkait empat upaya di atas adalah bahwa pembahasan RUU Ketenagakerjaan menjadi momentum penting untuk memperkuat aturan mengenai kewajiban pelaporan lowongan kerja serta penegakan sanksi bagi pihak yang melanggar. Dalam aspek penguatan infrastruktur, Komisi IX perlu mendorong peningkatan anggaran untuk pembangunan sistem digital dan pelatihan bagi pengawas ketenagakerjaan. Melalui fungsi pengawasan, Komisi IX juga dapat mendesak pemerintah agar meningkatkan literasi digital masyarakat. Adapun terkait koordinasi antarinstansi, Komisi IX perlu mendorong agar pembentukan Satgas lintas kementerian melalui Peraturan Presiden, sehingga seluruh instansi yang terlibat memiliki tingkat komitmen dan keseriusan yang sama dalam menjalankan tugasnya.

Penutup

Penipuan lowongan kerja menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Bagi pencari kerja, kejahatan ini menyebabkan kerugian materiel dan imateriel. Bagi platform lowongan kerja dan perusahaan, reputasi mereka dapat tercoreng dan kepercayaan publik ikut menurun. Lebih jauh, maraknya penipuan ini juga berpotensi mengganggu keamanan nasional dan stabilitas kawasan. Karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui penguatan regulasi, perbaikan infrastruktur, peningkatan literasi digital dan hukum, serta penguatan koordinasi lintas instansi.

Dalam konteks ini, Komisi IX DPR RI dapat berperan melalui pelaksanaan fungsi anggaran untuk mendukung pendanaan perbaikan infrastruktur, melalui fungsi legislasi untuk memperkuat aturan pelaporan lowongan kerja dalam RUU Ketenagakerjaan, serta melalui fungsi pengawasan untuk mendorong pemerintah meningkatkan literasi dan memperkuat koordinasi antarinstansi.

Referensi

- Aristyo, R. (2024, November 25). Jobstreet: Sindikat penipuan lowongan kerja lewat platform online semakin marak. *Mashable*. <https://id.mashable.com/tech/3796/jobstreet-sindikat-penipuan-lowongan-kerja-lewat-platform-online-semakin-marak>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Berita Resmi Statistik*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/2480/indeks-pembangunan-manusia-ipm-indonesia-tahun-2025-mencapai-75-90-meningkat-0-88-poin-dibandingkan-tahun-sebelumnya-yang-sebesar-75-02.html>
- Cityguard. (2025, Juli 23). Modus penipuan lowongan kerja online yang bikin-orang tertipu. *Cityguard*. <https://cityguard.co.id/modus-penipuan-lowongan-kerja-online-yang-bikin-orang-tertipu/>.
- Larasati, C. (2025, Agustus 2). Cari kerja di indonesia makin susah, pakar IPB ungkap penyebabnya. *Medcom.id*. <https://www.medcom.id/pendidikan/jobseeker/JKR5ZyVk-cari-kerja-di-indonesia-makin-susah-pakar-ipb-ungkap-penyebabnya#:~:text=Jakarta%3A%20Tingginya%20angka%20pengangguran%20di%20Indonesia%20masih%20menjadi,adanya%20kesenjangan%20antara%20permintaan%20dan%20penawaran%20tenaga%20kerja>
- Nadira, F. (2025, November 27). Alasan Indonesia jadi sasaran utama penipuan bermodus loker. *Cnbcindonesia.com*. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20251127155529-33-689112/alasan-indonesia-jadi-sasaran-utama-penipuan-bermodus-loker>
- Nurhadi, M. (2024, Juli 8). Waspada penipuan berkedok lowongan, niat cari rejeki malah terjerat pinjol. *Suara.com*. <https://www.suara.com/bisnis/2024/07/08/114554/waspada-penipuan-berkedok-lowongan-niat-cari-rejeki-malah-terjerat-pinjol>
- Indonesia Jadi Pusat Penipuan Kerja. (2025, November 20). *Kompas*.
- Iriawan, H. (2025, Juni 17). Penipuan rekrutmen kerja di basco city mall padang, 138 orang korban lapor polisi. *Kabarminang.com*. <https://kabarminang.com/penipuan-rekrutmen-kerja-di-basko-city-mall-padang-138-orang-korban-lapor-polisi/>
- Sihotang, Y. A. dkk (2025, November 27). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sebagai admin judi online. *Inovasi*, 5(1). <https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i1.5583>